

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Globalisasi membawa pengaruh terhadap suatu negara salah satunya dengan adanya tren *fast fashion* dimana produk ini merupakan produk dengan harga murah namun tetap mengikuti tren yang ada sehingga masyarakat tergiur untuk membeli produk yang dihasilkan dari industri *fast fashion*. Kapitalisme memberikan dampak pada arus produksi *fast fashion* hingga ke negara berkembang salah satunya India. India sendiri merupakan rumah bagi sektor tekstil dan pakaian dari domestik maupun ekspor terbesar di dunia. India mulai mengekspor pada tahun 1660-an, sejak saat itu sektor ini memberikan kontribusi terhadap kemajuan sosio-ekonomi yang besar bagi negara ini. Saat ini India menghasilkan 200 miliar USD dan berkontribusi pada produk domestik bruto India sebanyak 3%, industri manufaktur 13% dan pendapatan ekspor 12% dimana India juga dapat menyediakan lapangan kerja sekitar 45 juta angkatan kerja (Khurana 2022).

Industri *fast fashion* memiliki banyak peminat dimana saat ini industri ini tiap tahunnya membutuhkan pasokan pakaian dalam waktu yang singkat dengan biaya produksi yang rendah. *Fast fashion* sendiri memiliki tujuan untuk merancang pakaian dengan model terbaru sejalan dengan tren yang ada, namun produk yang ditawarkan ke pasar dijual dengan harga yang terjangkau dimana dalam hal ini perusahaan bertujuan untuk menarik lebih banyak konsumen. Perusahaan yang menjadi produsen dalam industri *fast fashion* ini tentunya terdiri dari perusahaan transnasional, dimana bagi negara berkembang perusahaan transnasional merupakan salah satu penyumbang terbesar ekonomi suatu negara (Vedeikytė and Lechmanová 2019).

Saat ini perusahaan transnasional merupakan sumber modal yang sangat dibutuhkan sebagai pembangunan ekonomi khususnya bagi negara berkembang. Perusahaan transnasional dianggap sebagai badan usaha dimana perusahaan tersebut dianggap menguasai dan mengelola fasilitas dan kegiatan produksi yang tersebar di beberapa negara. Perusahaan transnasional sendiri merupakan

perusahaan yang memiliki skala besar dengan laba kotor yang tinggi, perusahaan transnasional juga mengembangkan dan mendirikan produksi di negara lain dengan tujuan agar dapat memperoleh keuntungan yang tinggi (Vedeikytė and Lechmanová 2019).

Perusahaan transnasional memanfaatkan negara berkembang karena harga upah yang sangat rendah dimana harga upah dapat mempengaruhi harga dari industri *fast fashion* itu sendiri. India merupakan negara yang ekonominya berasal dari industri tekstil atau *fast fashion*. India menyediakan upah minimum yang menjadi salah satu upah terendah bila dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, dimana India menyediakan upah terendah di kawasan Asia Selatan. Tenaga kerja yang ditawarkan India dengan upah rendah juga menjadi nilai jual yang membuat negara ini tetap bertahan menghadapi persaingan (Khurana 2022).

Gambar 1 Logo H&M



Sumber : Logos-World

Salah satu perusahaan transnasional dan *brand* industri *fast fashion* ialah H&M. H&M didirikan oleh Erling Persson pada tahun 1947 dimulai dari toko kecil yang menjual pakaian wanita lalu berkembang menjadi toko global. H&M beroperasi sebagai industri ritel dengan kantor pusat di Swedia. H&M sendiri pertama kali hadir di India pada tahun 1982. Fokus utama H&M awalnya adalah melayani pelanggan dengan kualitas yang baik namun dengan harga yang terjangkau dan dapat menjadi bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan ini menggarap bisnis *fashion* untuk semua golongan, usia dan juga kiblat tren nya masing-masing

dengan tujuan tetap menyediakan *fashion* dengan tren terbaru namun tetap dengan harga yang terjangkau (Vedeikytė and Lechmanov 2019).

Perusahaan-perusahaan yang menaungi bisnis di industri *fast fashion* kebanyakan fokus untuk menempatkan sumber produksi atau rumah produksi dekat dengan negara asalnya. H&M sendiri telah melakukan ekspansi selama ini, dimana menurut (Rosyda and Alex S. Nitisemito 2020) ekspansi sendiri ialah upaya suatu perusahaan dalam memperluas pasar juga kapasitas produksi dari perusahaan tersebut karena adanya peningkatan yang dilakukan oleh konsumen terkait permintaan produk juga kapasitas perusahaan. Karena adanya peningkatan juga perluasan perusahaan maka H&M memilih untuk menjadikan India sebagai rumah produksi karena India menyediakan jasa yang dapat memenuhi target produksi masal dan cepat dengan upah minimum (Rosyda and Alex S. Nitisemito 2020).

Dampak dari ekspansi perusahaan H&M sebagai *house country* di India merupakan hal yang dianggap baik karena perusahaan transnasional ini dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi domestik juga memberikan keuntungan untuk India tetap eksis di kancah ekonomi internasional. Namun, ekspansi yang dilakukan H&M banyak menuai kritik karena dianggap memanfaatkan negara berkembang melalui eksploitasi. Para pekerja di India dihadapkan dengan kondisi pekerjaan yang tidak layak yang mengakibatkan pekerja mengalami iritasi mata, sakit kepala, gangguan pernapasan hingga turunnya berat badan akibat kurangnya kesempatan untuk beristirahat dan makan yang diberikan oleh perusahaan. Upah yang diberikan kepada pekerja dibawah upah minimum yang ditetapkan negara, dan banyak terjadi kekerasan baik fisik maupun verbal saat bekerja (Amary Siagian 2021).

Pekerja di India diberi gaji yang sangat rendah secara umum sekitar 35 sen atau 0,35 AUD per jam dimana setara dengan 3.500 rupiah per jam lebih rendah dari batas yang telah ditentukan dari minimal gaji seharusnya yaitu 39 sen atau 0,39 AUD yang setara dengan 4.000 rupiah. Dengan upah yang sangat rendah, pekerja *fast fashion* yang ada di India bekerja melebihi batas waktu pekerja yang telah ditetapkan yaitu 8 jam bekerja. Para pekerja dipaksa untuk memenuhi target tanpa memperhatikan kondisi kesehatan pekerja dimana tidak adanya hak keselamatan

dan kesehatan dalam industri ini membuat eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan makin jelas terlihat (Setyoningrum 2020).

India merupakan negara dengan ketergantungan juga kemiskinan yang sangat kompleks, dimana hal ini memicu adanya eksploitasi yang dilakukan oleh ekspansi perusahaan transnasional negara maju di negaranya. Eksploitasi tenaga kerja yang dilakukan oleh India sudah lama terjadi namun hingga saat ini belum menemukan titik terang untuk mengatasi secara keseluruhan bagaimana eksploitasi tenaga kerja dapat dihentikan. Pada industri *fast fashion* India memperkerjakan 4 juta penduduk yang di dominasi oleh perempuan. Namun, pada implementasinya para pekerja tidak mendapatkan hak buruh yang layak di industri ini, India bergantung pada industri *fast fashion* untuk memajukan ekonomi negaranya, namun disisi lain tekanan yang dilakukan oleh perusahaan transnasional dan tidak adanya hak kesejahteraan yang menjamin menjadi persoalan yang dihadapi setiap tahunnya (Sukma Ayu Putri 2021).

Upah yang diberikan dibawah upah minimum bukanlah satu-satunya permasalahan yang dihadapi India saat ini. Hak buruh lainnya seperti kesejahteraan kesehatan, berada dalam lingkup kerja yang aman, perlindungan dari segala bentuk ancaman termasuk kekerasan fisik tidak didapatkan oleh para pekerja industri *fast fashion* di India. Salah satu kasus yang pernah terjadi ialah pada tahun 2016, *campaign clean clothes* melaporkan adanya lingkungan pekerja yang berbahaya dan kurangnya perlengkapan untuk bekerja juga kurangnya fasilitas penting yaitu pintu darurat kebakaran untuk pekerja di perusahaan transnasional H&M. padahal pada kuartir kedua tahun 2011 H&M mengalami insiden kebakaran dimana pada insiden tersebut menewaskan 21 pekerja dan 50 pekerja mengalami luka serius (Innesia Ma'sumah and Indra Kusumawardhana 2018).

Dalam kasus lainnya, pada tahun 2013 pabrik industri tekstil di Shavar bernama Rana Plaza mengalami keruntuhan yang menewaskan sebanyak 1.138 buruh pabrik dan merupakan kecelakaan terbesar dalam sejarah yang dialami oleh pabrik tekstil. Kurangnya kesejahteraan pekerja dan keamanan tempat bekerja untuk para buruh didukung dengan bukti sehari sebelum pabrik Rana Plaza ambruk terdapat liputan mengenai retaknya bangunan yang mengakibatkan tutupnya toko

dan juga bank di lantai bawa Rana Plaza. Namun, pabrik tersebut tetap memperkerjakan para buruh tanpa ada himbauan dan juga khawatir akan hal buruk yang akan terjadi. Para buruh bahkan diancam dengan pemotongan gaji selama sebulan oleh manager pabrik apabila di hari berikutnya para buruh tidak datang untuk bekerja (Amary Siagian 2021).

Gambar 2. Keruntuhan Bangunan Rana Plaza



Sumber : thedailystar.net

Tragedi ini telah menjadi peringatan akan urgensi isu hak pekerja dalam industri *fast fashion* India harus segera ditangani dan juga dipantau seiring berkembangnya industri tersebut. Dengan banyaknya korban pada tragedi ini menandakan bahwa hak asasi pekerja di India sangatlah minim, padahal industri *fast fashion* merupakan industri yang menjadi tulang punggung perekonomian negara ini. Sektor *fast fashion* telah memberikan kontribusi yang besar pada negara ini dengan memajukan sosio ekonomi dalam beberapa dekade terakhir. *Fast fashion* saat ini bernilai 200 miliar USD yang berkontribusi sebanyak 3 persen terhadap produk bruto India, 13 persen pada industri manufaktur, 12 persen pendapatan dari ekspor tekstil dan 45 juta lapangan kerja. Karena rendahnya faktor pendidikan juga pengetahuan yang dimiliki oleh para pekerja di India menyebabkan tidak

berdayanya pekerja dalam menyuarakan hak-hak yang seharusnya di dapatkan oleh para pekerja di India (Khurana 2022).

Permasalahan yang terjadi di India tidak hanya pada standarisasi pabrik dan keamanan kerja saja. Upah buruh menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh H&M dimana upah yang diberikan dinilai terlalu rendah. Karena adanya protes yang dilakukan oleh para buruh hingga turun ke jalan bersama dengan dukungan yang diberikan oleh asosiasi buruh. H&M lalu menaikkan upah minimum terakhir pada tahun 2012 dimana Karl John Persson sebagai *Chief Executive Officer* (CEO) H&M melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri India untuk menaikkan upah minimum. Dampak dari ekspansi perusahaan ini mendorong Karl John untuk menaikkan upah buruh dengan tujuan agar H&M dapat tetap mempertahankan manufakturnya di India karena seiring berjalannya waktu semakin banyak pesaing yang menjadikan India sebagai tujuan manufaktur korporasinya. Namun, upah yang diberikan oleh H&M termasuk upah rendah bila dibandingkan dengan negara lainnya (Trully Erlynda 2020).

Selain permasalahan upah dan juga standarisasi pabrik, pemenuhan hak buruh dalam kesejahteraan pekerja juga menjadi urgensi di India salah satunya yaitu eksploitasi pekerja perempuan. Para pekerja menyatakan bahwa karena adanya tuntutan dari perusahaan berakibat pada kekerasan seksual dan fisik yang dialami oleh pekerja perempuan. *Asia Floor Wage Alliance* (AFWA) pada tahun 2016 membuat pernyataan bahwa para pekerja di pabrik H&M di India mengalami eksploitasi kerja dimana praktik dari pelanggaran dalam standarisasi perburuhan internasional sangat marak terjadi. Pelanggaran yang ada mencakup serangan fisik dari manager pabrik atau bahkan preman bayaran. Dimana dalam data HRW dari wawancara 160 pekerja yang berasal dari 44 pabrik di Dhaka menyatakan saat mereka bekerja mendapatkan perlakuan negatif seperti pelecehan seksual, lembur paksa, pemotongan upah kerja hingga perusahaan yang menolak cuti bagi pekerja yang akan melahirkan (M Faisal 2021).

Pada tahun 2022 H&M akhirnya berjanji untuk mengakhiri kekerasan seksual yang terjadi di pabrik India setelah pekerjanya terbunuh. Secara hukum H&M sudah menandatangani perjanjian yang mengikat, setelah meninggalnya wanita

dalit berusia 20 tahun pada tahun 2021 yang dilakukan oleh atasannya. Dimana wanita ini mengalami pelecehan seksual dan juga intimidasi selama berbulan-bulan sebelum kematiannya dan tidak dapat melakukan apapun untuk menyuarkan haknya. Berdasarkan ketentuan perjanjian semua pekerja dan eksekutif harus melakukan pelatihan kekerasan berbasis gender dan akan melatih pekerja wanita untuk menjadi pengawas dalam pabrik, agar perempuan dapat merasa terlindungi dari adanya pelecehan verbal dan intimidasi seksual (Annie Kelly 2022).

Pemenuhan hak buruh untuk para pekerja di India merupakan urgensi yang harus segera diselesaikan. Adanya eksploitasi oleh perusahaan merupakan hal yang telah melanggar standar perburuhan internasional. Perusahaan transnasional tidak hanya memanfaatkan ekonomi suatu negara untuk memberikan keuntungan yang melimpah, namun juga memanfaatkan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada para pekerja. Pekerja di India khususnya di industri *fast fashion* membutuhkan hak-hak yang seharusnya menjadi hak mereka dalam bekerja tanpa adanya kekerasan, intimidasi, dan pemberian upah dibawah upah minimum (Annie Kelly 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengkaji permasalahan yang terjadi karena adanya masalah urgensi pemenuhan hak buruh yang ada di India terlebih dengan adanya dampak dari ekspansi salah satu perusahaan transnasional yaitu H&M. Dalam hal ini dampak ekspansi yang terjadi karena perusahaan H&M sangat berpengaruh pada pemenuhan hak buruh di India salah satunya upah kerja yang sangat sedikit apabila dibandingkan dengan negara lain. Pemenuhan hak buruh lainnya seperti keamanan tempat bekerja, standarisasi pabrik, kekerasan seksual, kekerasan fisik dan juga intimidasi yang terjadi akibat penekanan perusahaan terhadap buruh.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana dampak dari ekspansi yang dilakukan oleh H&M dapat mempengaruhi pemenuhan hak buruh di India. Selain itu, peneliti juga mencoba untuk mengidentifikasi terkait bagaimana upaya yang dilakukan H&M dalam memenuhi hak buruh khususnya yang terjadi di India. Dalam kajian ini, peneliti menggunakan teori liberalisme, *Multinational Corporation*, dan *human rights* untuk meneliti fenomena tersebut. Maka dari itu, penulis mengangkat

fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **Dampak Ekspansi Perusahaan H&M Terhadap Pemenuhan Hak Buruh di India.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis bermaksud untuk membahas mengenai permasalahan, yaitu:

“Bagaimana dampak dari ekspansi perusahaan H&M terhadap pemenuhan hak buruh dalam industri fast fashion yang terjadi di India?”

1.3. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya, maka penulis membatasi masalah yang ada pada dampak ekspansi yang diakibatkan oleh perusahaan H&M di India mengenai pemenuhan hak buruh dalam periode waktu yang tentunya relevan. H&M sebagai bagian dari TNC tentunya akan menjadi titik fokus perusahaan yang peneliti teliti terutama dalam hal ekspansi.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya oleh penulis, penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dampak H&M sebagai TNC dalam peningkatan angka pertumbuhan ekonomi di India dari ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan H&M ke dalam India.
2. Untuk mengetahui penyerapan angka perusahaan dari ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan H&M dan ketimpangan hak buruh yang terjadi di India.
3. Untuk mengetahui bagaimana respon dari perusahaan H&M, pemerintahan India, dan buruh (ILO) di India dalam isu hak buruh di India khususnya di industri *fashion*.

1.4.2. Kegunaan Penelitian Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penulis paparkan diatas maka terdapat pula kegunaan teoritis bagi penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak buruh oleh perusahaan khususnya dalam industri *fashion* di India.
2. Untuk mengetahui bagaimana ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan dalam industri *fashion* khususnya H&M.

1.4.3. Kegunaan Penelitian Praktis

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penulis paparkan diatas maka terdapat pula kegunaan praktis bagi penelitian ini, yaitu:

1. Sebagai kegunaan akademis penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional ataupun mahasiswa program studi lain untuk menambah informasi mengenai dampak dari ekspansi perusahaan H&M dalam pemenuhan hak-hak buruh khususnya yang terjadi di India.
2. Sebagai syarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.